

STRATEGI KERJASAMA PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT GUNA MENGHADAPI ANCAMAN KONFLIK LAUT CINA SELATAN DALAM RANGKA MENJAGA HAK BERDAULAT NKRI

Oleh :

Bambang Wasito¹⁾, Surya Wiranto²⁾, Gentio Harsono³⁾

^{1,2,3}Prodi Strategi dan Kampanye Militer, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

Abstrak

Konflik Laut China Selatan (LCS) menjadi perhatian karena merupakan batas negara dan memiliki potensi sumber daya alam. Amerika Serikat pada bulan Juli 2020 menolak klaim sengketa China untuk sumber daya lepas pantai pada wilayah tersebut sehingga meningkatkan latihan dan patrolinya sebagai bentuk kebebasan navigasi. Indonesia sebagai kawasan Indo-Pasifik juga mengerahkan strategi geopolitik dengan dengan Amerika dalam rangka menjaga kedaulatan negara sehingga perlu diketahui faktor dan setrategi Kerjasama pertahanan antara kedua negara dalam rangka menghadapi konflik LCS. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan ex post facto. Data penelitian diperoleh dengan wawancara, observasi dan studi literatur. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi dan dianalisa menggunakan alur sesuai teori Hubberman dan Saldana (2014) menggunakan SWOT, PESTLE serta AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan faktor internal yang dapat meningkatkan maupun menghambat kerjasama adalah adanya lembaga pengelolaan kerjasama sumber daya dengan skor 1,9. Kelemahan faktor internal adalah ego sectoral dengan nilai 1,89 namun dapat ditutupi oleh kekuatan berdasarkan matriks IFAS. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah politik bebas aktif dengan skor Matriks EFAS adalah 4. Penghitungan AHP menunjukkan bahwa strateginya adalah SO (Strenghts-Opportuniny) yang menduduki ranking pertama dengan nilai 0,50 yaitu pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia dengan memaksimalkan kemampuan Lembaga negara sesuai dengan budaya politik, memaksimalkan pengawasan dan pengendalian Lembaga sesuai isu internasional serta Kerjasama dan penilaian secara intensif.

Kata Kunci: Kerjasama, Indonesia-Amerika, Laut Cina Selatan, Kedaulatan

1. PENDAHULUAN

Konflik Laut China Selatan (LCS) dewasa ini kian menjadi perbincangan hangat dikarenakan proses sengketa kepemilikan yang belum juga selesai. Enam negara yang terlibat mengklaim wilayahnya di LCS yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam dan Malaysia. Indonesia dalam hal ini bukan merupakan negara claimant dalam konteks kepemilikan LCS. Hasil dari putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag terkait LCS semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut (Sire, 2019).

Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri yang “bebas aktif”, Indonesia memahami kerumitan dari konflik LCS. Selain itu, masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (sovereignty), termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia agar meminimalisir konflik yang terkait dengan batas wilayah. Sire (2019) menjabarkan bahwa salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan (*diplomacy border*) agar

terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktifitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut. Namun, Indonesia tetap mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan antar negara terutama masalah wilayah perbatasan.

Amerika Serikat pada bulan Juli 2020 menolak klaim sengketa China untuk sumber daya lepas pantai di sebagian besar LCS. Palsanya, China tidak memberikan dasar hukum yang koheren untuk ambisinya di LCS. Perkembangan di LCS telah berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan dan mengganggu terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional sehingga Amerika mengambil langkah untuk melakukan Kerjasama dengan beberapa negara termasuk Indonesia untuk menjaga perdamaian. Indonesia juga berencana membeli alutsista dan kerjasama diklat lainnya dengan AS, maka benar undangan AS pada Menhan salah satu manuver untuk meyakinkan Indonesia agar bisa menggunakan fasilitas lanud (pangkalan udara) bagi pesawat udara intai AS. Secara geostrategis, Indonesia memiliki posisi penting bagi pihak-pihak yang bersitegang (Sukmadewi, P., 2019). Maka dari itu, peneliti ingin mengangkat penelitian terkait dengan Kerjasama pertahanan di LCS dengan judul “Strategi Kerjasama Pertahanan RI dan AS guna

Menghadapi Ancaman Konflik Laut China Selatan (LCS) dalam Rangka Menjaga Hak Berdaulat NKRI”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method yang merupakan metode campuran yang menggabungkan jenis desain kualitatif dan kuantitatif (Subedi, 2016). Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif dan Ex Post Facto yaitu meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor peningkatan atau penghambat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam konflik LCS. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni hingga September 2021 dengan sumber dan jenis data primer serta sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan kuesioner pada informan dari Kementerian Pertahanan RI dan Mabes TNI yang kemudian didukung dengan observasi dan studi literatur. Analisis data menggunakan teori kerjasama internasional dan analisa SWOT-ANP dalam penentuan faktor yang berpengaruh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor peningkatan dan penghambatan Kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat dalam menghadapi konflik LCS

Data sejarah nasional menyebutkan bahwa pemerintah negara Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan dengan berbagai negara sahabat, dengan esensi tujuannya adalah sebagai salah satu cara untuk mencegah konflik yang mungkin akan terjadi. Satu diantara dari kerjasama pertahanan tersebut adalah kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika yang sudah terjalin secara resmi sejak 1949 dan terselenggara dengan penuh dinamika sesuai perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika yang mencakup berbagai bidang dipandang sebagai langkah strategis sebagai solusi untuk menghadapi ancaman konflik yang terjadi di Laut China Selatan saat ini namun demikian output dari kerjasama pertahanan tersebut belum mampu meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan Indonesia, maka dari itu diperlukan suatu upaya untuk mengoptimalkan kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika tersebut.

Kriteria faktor dianalisa berdasarkan pendapat Asan dkk. (2002) mengenai kepentingan faktor pengawasan, pengendalian dan pengelolaan sumber daya dalam implementasi strategi. Analisa faktor internal organisasi dapat dilihat dari kapasitas sumber daya manusia, prosedur pengendalian dan pengawasan, Lembaga atau organisasi pengelola sumber daya dan Lembaga penilaian Kerjasama.

Bobot tertinggi terdapat pada penilaian strategi kerjasama dan analisa kepentingan. Tiap lembaga yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan strategi kerjasama pada dasarnya telah memiliki

sarana prasarana yang diperlukan. Pengelolaan dan pengawasan terhadap fasilitas yang telah ada harus dapat dilakukan secara optimal melalui kerjasama antara kedua lembaga besar yaitu TNI dan Kementerian Pertahanan. Selain itu, Diplomasi pertahanan merupakan upaya penting untuk mempersiapkan kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman serta mempertahankan keyakinan dalam pembangunan demokrasi. Kerja sama Pertahanan Indonesia dan AS secara historis menjadi bagian penting dari hubungan kedua negara dengan tingkat kerjasama yang baik dalam membangun hubungan pribadi dan membentuk jaringan yang dapat memperkuat kerja sama militer di masa depan yang akan datang. Dinamika konflik di Laut China Selatan saat ini menunjukkan kecenderungan sulitnya menemukan sesuatu yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga diperlukan forum dalam memfasilitasi kepentingan tersebut.

Prioritas kerja sama internasional dilakukan dengan meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral dengan meningkatkan langkah membangun kepercayaan yang dilakukan dengan pendekatan diplomatik yang bertujuan pada kondisi dimana kerja sama pertahanan dengan AS didasarkan pada prinsip simbiosis mutualisme dalam membangun kepentingan nasional dan memelihara negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan utama kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat adalah perwujudan tugas TNI yang bersinergi dengan Kementerian Pertahanan dalam membangun dan membangun kekuatan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan menguasai Negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman dan melindungi kepentingan nasional. Dinamika keamanan lingkungan global akibat dominasi kepentingan negara-negara maju yang ingin melindungi kepentingan nasionalnya, memberikan kewaspadaan bagi Indonesia untuk selalu waspada dalam menjaga hak kedaulatan wilayah. Mekanisme kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika dianggap mampu dan dapat mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul sewaktu-waktu.

Analisa faktor eksternal berdasarkan kriteria yang telah disusun membantu menemukan peluang dan ancaman dalam pelaksanaan strategi kerjasama yang biasanya berjalan kompetitif antar negara dengan kepentingannya masing-masing. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kerjasama adalah kemampuan pengelolaan politik nasional, isu nasional maupun internasional, analisa kepentingan dan politik bebas aktif Indonesia. Hasil analisis faktor internal dan eksternal tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai bentuk penilaian strategi yang telah berjalan yang kemudian dilakukan pembobotan dengan matriks IFAS maupun EFAS.

Analisis matriks IFAS menunjukkan nilai 3,79. Hasil ini diperoleh dari faktor kekuatan tambahan dengan skor 1,9 dan kelemahan organisasi dengan skor 1,89 yang artinya kekuatan organisasi diasumsikan dapat menutupi kelemahan. Kekuatan tertinggi dalam organisasi adalah adanya lembaga atau organisasi pengelolaan sumber daya yang melaksanakan tugasnya dengan baik dalam implementasi strategi kerjasama, sedangkan kelemahan tertinggi adalah ego sektoral pada pengelolaan dan penilaian sumber daya. Hasil analisis matriks EFAS dapat diketahui bahwa skor yang diperoleh adalah 4. Hasil ini diperoleh dari penjumlahan faktor kekuatan sama dengan faktor kelemahan dengan skor 2 sehingga dapat diasumsikan bahwa peluang dalam implementasi telah dimanfaatkan dengan baik dalam rangka menghadapi ancaman yang ada. Politik bebas aktif Indonesia menjadi peluang tertinggi dalam pelaksanaan strategi kerjasama antar kedua negara. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat mengatasi ancaman berupa sentiment negative karena adanya kebijakan budaya politik tersebut.

Strategi Kerjasama Pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat guna Menghadapi Konflik Laut Cina Selatan

Sinergi antara analisis IFAS dan EFAS dengan SWOT menggambarkan potensi strategi yang sesuai dengan kapasitas dan kondisi lingkungan organisasi yang kompleks dan multidimensi. Posisi strategi menunjukkan bahwa implementasi strategi kerjasama berada dalam situasi moderat atau sedang sehingga memerlukan konsentrasi dalam rangka memaksimalkan fungsi melalui integrasi horizontal. Lembaga yang berperan dalam implementasi strategi antara Indonesia dan Amerika Serikat guna menghadapi ancaman konflik Laut Cina Selatan dalam rangka menjaga hak kedaulatan NKRI berada pada situasi dan kondisi Sedang-Sedang. Lembaga pelaksana secara eksternal cukup banyak peluang dengan sumber daya bersifat sedang. Kondisi dapat direspon menggunakan strategi horizontal (Horizontal Integration Strategy) yang mengharuskan lembaga terkait perlu melibatkan pihak lain dalam rangka upaya peningkatan koordinasi pihak yang saling berkepentingan pada pelaksanaan kerjasama pertahanan.

Analisa matriks EFAS dan IFAS sekaligus Terdapat empat kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT sebagai berikut.

a. Strategi SO

1. Melaksanakan pengelolaan SDM dengan menggunakan kemampuan Lembaga Negara sesuai politik negara
2. Tujuan pengawasan pengendalian lembaga kerjasama selaras dengan analisa isu internasional
3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait pengawasan dan pengendalian dalam rangka menselaraskan tujuan kerjasama

4. Penilaian mengenai kerjasama luar negeri agar dapat digunakan sebagai sumber daya penting bagi kegiatan kerjasama

b. Strategi ST

1. Pengelolaan isu nasional dan internasional oleh SDM yang ahli
2. Mencari supplier bahan baku dengan harga yang kompetitif
3. Melakukan sinergitas kerjasama antar lembaga/organisasi
4. Melakukan pemberdayaan lembaga/organisasi dalam menyampaikan politik bebas aktif

c. Strategi WO

1. Meningkatkan kemampuan SDM dengan menggunakan dukungan antar lembaga/organisasi
2. Menggunakan isu internasional untuk menjalin kerjasama dengan prinsip menguntungkan kondisi Konflik
3. Menggunakan tujuan yang sama dalam mengurangi ego sektoral
4. Menggunakan politik bebas aktif untuk menjalin kerjasama dengan prinsip menguntungkan kondisi Konflik

d. Strategi WT

1. Rancangan kerjasama yang selaras dengan politik nasional .
2. Rancang kerjasama yang selaras dengan politik internasional
3. Rancang Pengelolaan Sumber daya dalam kerjasama
4. Rancang model strategi meningkatkan politik bebas aktif sebagai daya saing Indonesia

Hasil perhitungan AHP pada pengembangan strategi menunjukkan bahwa strategi SO (Strengths-Opportunities/Strengths and Opportunities) menduduki peringkat pertama dengan nilai 0,50. Strategi ini memanfaatkan kekuatan organisasi atau institusi untuk mengambil dan memaksimalkan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Pengelolaan sumber daya manusia dengan memaksimalkan peran lembaga negara sesuai dengan budaya politik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga implementasi kerjasama dapat berjalan dengan maksimal. Pengawasan dan pengendalian yang menjadi fungsi lembaga seharusnya dapat disesuaikan dengan dinamika lingkungan dan isu internasional. Kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan pengendalian dapat menjadi alternatif perbaikan fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik pada implementasi. Kerjasama maritime secara bilateral seharusnya dapat digunakan sebagai sumber daya penting yang harus dimaksimalkan sehingga memperoleh penilaian yang baik dari lembaga penilaian.

4. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Faktor peningkatan kerjasama adalah secara internal antara lain kompetensi SDM, prosedur pengendalian dan pengawasan, pengelolaan sumber daya dan penilaian kerjasama. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kerjasama pertahanan adalah kemampuan dalam pengelolaan politik nasional, isu nasional dan internasional serta Analisa kepentingan. Faktor internal tertinggi adalah lembaga pengelolaan sumber daya dan kelemahan tertinggi adalah ego sektoral dengan bobot 3,79 serta faktor kekuatan dapat menutupi kelemahan. Faktor eksternal tertinggi adalah politik bebas aktif.
2. Strategi kerjasama yang dapat dirumuskan adalah strategi kerjasama secara integrasi horizontal dengan melakukan peningkatan kualitas maupun kuantitas untuk dapat bersaing secara kompetitif. Strategi So menduduki rangking pertama sebagai rekomendasi strategi yaitu memaksimalkan kemampuan pengawasan dan pengendalian lembaga kerjasama negara sesuai budaya politik dan perkembangan internasional yang ada.

Rekomendasi

Beberapa rekomendasi praktis dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Kementerian pertahanan dapat meningkatkan peran diplomasi dan memaksimalkan fungsi kerjasama antar kedua negara.
2. TNI sebagai pelaksana di lapangan dapat mempertimbangkan mempertimbangkan kebijakan dan rencana strategis dalam implementasi strategi kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat sehingga tercipta kedaulatan NKRI dalam menghadapi ancaman konflik LSC.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kajian mengenai konseptualisasi strategi kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat guna menghadapi konflik LCS sehingga kedaulatan NKRI tetap terjaga.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asan, S., Panjaitan, A., Suwu, S. E., & Ferdinand, F. V. (2020). Employee Engagement and Organization Support Strategies: The Mediating Role of Perceived Organization Support for Holistic Employee Subjective Well-Being. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(4), 754-766.
- Sire. 2019. *Laut China Selatan: Strategi Indonesia dalam Sengketa Kawasan*. Diakses di <https://www.idntimes.com/science/discovery/nur-mar-a-siregar/laut-china-selatan-strategi-indonesia-dalam-sengketa-kawasan-exp-c1c2/5> pada 6 Juni 2021.
- Subedi, D. (2016). Explanatory sequential mixed method design as the third research community of knowledge claim. *American Journal of Educational Research*, 4(7), 570-577.

Sukmadewi, P. 2019. Indo-Pacific Treaty sebagai Perluasan Kerjasama Indonesia di bidang maritim. *Jurnal UMY Tahun 2019*